

QAULAN:

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam

P-ISSN : 2721-2780

E-ISSN : 2721-8279

DOI : <https://doi.org/10.56874/qau.v5i2.1842>

Vol. 5 No. 02, 2024

<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/qau>

QAULAN

"Analisis Buku *Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media*"

Email:

[Hafsah Juni Batubara](mailto:HafsahJuniBatubara)

hafsahjuni@stain-madina.ac.id / STAIN Mandailing Natal

Keywords

Social Media, Political,
Power

Abstrak

Dunia modern, khususnya melalui media sosial, telah sangat berubah karena kemajuan teknologi informasi. Dengan menganalisis beberapa studi kasus, artikel ini membahas peran media sosial dalam politik. Studi-studi ini menggambarkan kekuatan politik yang dapat dimanfaatkan oleh platform-platform ini. Studi ini mengeksplorasi bagaimana aktor politik menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memobilisasi pendukung, mempengaruhi opini publik, dan membuat agenda politik. Contoh kasus yang dikaji meliputi kampanye politik, gerakan sosial, dan protes yang dipimpin oleh media sosial. Fokus penelitian adalah bagaimana hal itu berdampak pada hasil pemilihan umum, bagaimana hal itu mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan bagaimana polarisasi sosial dan penyebaran informasi palsu muncul. Studi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai kekuatan politik yang dapat memengaruhi demokrasi dengan cara yang baik atau buruk. Ini memberikan pemahaman tentang bagaimana media sosial dapat memengaruhi politik saat ini dan tantangan moral yang harus dihadapi oleh para pemangku kepentingan.

Introduction

Media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi dalam beberapa dekade terakhir, termasuk dalam konteks politik. Situs seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah berkembang menjadi tempat penting untuk gerakan sosial, kampanye politik, dan mobilisasi massa[1]. Media sosial sekarang lebih

dari sekadar alat komunikasi; mereka dapat membentuk kebijakan, membentuk opini publik, dan mempengaruhi hasil pemilu[2]. Platform media sosial memungkinkan aktor politik berkomunikasi secara langsung dengan konstituen mereka, mempercepat penyebaran informasi, dan menggerakkan massa untuk tujuan tertentu. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, media sosial juga menghadirkan beberapa masalah: disinformasi menyebar, polarisasi politik, dan kontrol lebih besar atas informasi yang dapat mengganggu demokrasi[3].

Media sosial telah menjadi alat yang kuat untuk merestrukturisasi dinamika politik modern. Meskipun memungkinkan pemilih menjadi lebih terbuka dan terlibat, penggunaan media sosial juga dapat menyebabkan lebih banyak fragmentasi politik[4]. Media sosial memungkinkan kelompok yang sebelumnya tidak diwakili dengan baik, seperti pemilih muda dan minoritas, untuk lebih terlibat dalam percakapan politik. Media sosial meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan dan mempercepat penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah. Penulis menunjukkan bahwa aliran informasi ini memengaruhi opini publik dan keputusan pemilih[5].

Meskipun optimis, Shirky juga berbicara tentang masalah yang muncul. Ini termasuk informasi yang tidak dapat diandalkan, penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan, dan kesulitan untuk menjaga perhatian publik terhadap masalah dalam jangka panjang[6]. Media sosial memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah mereka dapat menghubungkan orang dari berbagai latar belakang tanpa struktur organisasi formal. Media sosial membantu protes di dalam negeri dan di seluruh dunia [7].

Dengan menganalisis beberapa studi kasus yang menunjukkan pengaruh dan kekuatan media sosial dalam konteks politik modern, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran media sosial dalam dunia politik. Tulisan ini menemukan cara media sosial digunakan untuk memobilisasi pendukung, membuat narasi politik, dan mengubah dinamika kampanye politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artikel ini akan membahas studi kasus tentang penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu, gerakan sosial yang dimulai di platform digital, dan pengaruh media sosial terhadap kebijakan pemerintah di berbagai belahan dunia.

Research Method

Buku "Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media", yang ditulis oleh Bogdan Patrut dan Monica Patrut (2014), digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh media sosial dalam politik. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai studi kasus yang membahas peran dan kekuatan media sosial dalam politik kontemporer.

Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan termasuk buku, artikel jurnal, laporan riset, dan publikasi akademik lainnya yang membahas interaksi antara media sosial dan politik. Metode studi pustaka adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan pemeriksaan literatur dan sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini mengeksplorasi konsep, teori, dan studi kasus yang dibahas oleh Patrut dan Patrut dan menganalisis kritis kesimpulan dan argumen mereka dalam buku mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh media sosial dalam politik. Buku "Media Sosial dalam Politik" berfungsi sebagai sumber utama, dan juga membandingkannya dengan literatur terkait lainnya.

Results And Discussion Results

Buku Media Sosial dalam Politik: Studi Kasus tentang Kekuatan Politik Media Sosial berisi 380 halaman dan memberikan gambaran tentang kekuatan media sosial, informasi warga, keterlibatan dan partisipasi mereka dalam debat politik dan kehidupan sehari-hari, serta komunikasi antara warga negara dan aktor politik. Beberapa optimisme dapat ditemukan, dan Web dianggap sebagai alat untuk mendorong dan memperdalam hubungan antara warga negara dan politisi. Namun, fokus kemudian beralih ke hilangnya kontrol atas informasi, kurangnya minat warga umum dalam politik, dan ketidaksetaraan akses ke Web dan informasi politik[5].

Buku ini menarik karena bagian pertamanya berfokus pada pendahuluan yang membahas beberapa masalah terkait politik dan koneksi media sosial. Ini juga mencakup beberapa model metodologis yang diperlukan untuk menjelaskan ketidaksetaraan penggunaan Internet dalam politik. Pada bagian kedua, gerakan sosial modern dan penggunaan Web mereka dibahas. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan tiga tahap pemilu: pemilihan kepala daerah, pemilihan umum dan parlemen, dan pemilihan presiden. Terakhir, bagian ketiga membahas bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memobilisasi orang untuk kerusuhan dan revolusi.

Dengan munculnya Web 2.0, terdapat peluang besar untuk mendorong partisipasi politik dengan membuat pemilih dan partai politik dapat berinteraksi dengan mudah. Ini juga divalidasi dalam situasi di mana situs web menawarkan peluang politik, seperti yang dilakukan oleh alat jejaring sosial. Dengan bantuan alat Web 2.0, partai politik dapat mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam kegiatan mereka. Ini termasuk berpartisipasi dalam kegiatan partai, menyumbang dana untuk kampanye, menandatangani petisi, atau bahkan berkonsultasi tentang masalah kebijakan.

Menurut Chadwick (2006), ada tiga poin utama dalam perdebatan tentang bagaimana penggunaan Internet dapat memengaruhi politik partai: (1) kompetisi antar partai meningkat Partisi politik baru dan gerakan non-partai dapat menggunakan Internet untuk meningkatkan visibilitas mereka. Selain itu, internet memiliki potensi (2) untuk menyebarkan kekuasaan di antara individu di seluruh dunia, meningkatkan kontrol akar rumput atas kandidat dan pemimpin politik. Struktur jaringan Internet memungkinkan hubungan terus-menerus antara kandidat dan pendukung mereka. Mereka kemudian memiliki lebih banyak kontrol atas tiga pemimpin mereka. (3) penyesuaian institusi. Ini berpendapat bahwa, ketika politik beralih ke Internet, lembaga politik mengikuti tren yang sama seperti dalam politik di luar Internet untuk mengawasi potensi inovasi Internet.

Media sosial memainkan peran penting dalam memobilisasi orang untuk kerusuhan dan revolusi, tetapi juga dapat menyebabkan kekacauan dan kepanikan di antara pengguna dan orang biasa [6]. Dibandingkan dengan elemen lain dari gerakan sosial, media baru menjadi cara yang lebih penting dan instan untuk menyebarkan informasi secara global. Dunia maya secara bertahap menemukan relevansi sosialnya, dan orang-orang dapat melihat, meninjau, dan menganalisis peristiwa di seluruh dunia. Media sosial adalah platform terbuka yang dapat digunakan oleh orang-orang untuk tujuan yang baik maupun buruk.

Media sosial, terutama Facebook dan Twitter, sangat penting untuk berbagi informasi dan membuat konten yang terkait dengan gerakan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam percakapan di media sosial. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, dan yang kedua mengatur parameter untuk mengumpulkan hanya informasi yang telah dipilih. Tidak masalah bagi pengguna apa yang kita gunakan. Pengguna media sosial dapat berkontribusi dalam arus informasi juga. Pengguna mengumpulkan informasi berita dari berbagai sumber dan menyingkirkan informasi yang kurang penting.

Dengan mengatakan bahwa media sosial meliberalisasi arus informasi, kita harus memeriksa dan menganalisis apakah gagasan arus informasi bebas benar-benar ada di Internet dan media sosial atau dipengaruhi oleh beberapa aktor yang memahami psikologi sosial. Pengguna media yang tinggal di seluruh dunia menjalankan agenda mereka di media sosial dan mencoba mempengaruhi pengguna; dalam beberapa kasus, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyesatkan pengguna tentang masalah tertentu dan sebagai sumber propaganda. Oleh karena itu, tidak semua informasi yang mengalir dari media sosial benar dan valid, dan tidak semua pandangan dan pemikiran selalu diwakili oleh pengguna massa.

Buku "Media Sosial dalam Politik: Studi Kasus tentang Kekuatan Politik Media Sosial" oleh Bogdan Patrut dan Monica Patrut (2014) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kekuatan politik yang signifikan di era internet. Buku ini memberikan

pemahaman mendalam tentang bagaimana media sosial, sebagai alat komunikasi yang luas dan cepat, digunakan untuk mempengaruhi opini publik, mengorganisasi gerakan politik, dan mendukung perubahan sosial dalam berbagai konteks politik di seluruh dunia.

1. Peran Media Sosial dalam Mobilisasi Politik: Buku ini menyimpulkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam mobilisasi politik. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan untuk kampanye politik tetapi juga digunakan untuk mengatur demonstrasi dan gerakan sosial. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube telah memungkinkan politisi dan masyarakat untuk mengatur aksi massa dengan lebih efektif dan murah. Bagaimana media sosial dapat mendorong perubahan politik di negara-negara yang otoriter ditunjukkan oleh demonstrasi besar seperti Arab Spring (2010–2011).
2. Pengaruh Terhadap Opini Publik dan Hasil Pemilu: Buku ini juga membahas bagaimana media sosial memengaruhi opini publik dan hasil pemilihan umum. Media sosial terbukti efektif dalam memperluas basis dukungan dan memobilisasi pemilih dalam beberapa penelitian, seperti kampanye Presiden AS 2008 dan 2012 yang menggunakan Facebook dan Twitter untuk menjangkau pemilih muda. Dengan platform ini, kandidat politik dapat berinteraksi secara langsung dengan pemilih, menjalin hubungan yang lebih intim, dan menyampaikan pesan mereka tanpa melalui pengawasan yang lebih besar dari media konvensional.
3. Tantangan Etis dan Risiko Disinformasi: Namun, buku tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam politik menghadapi banyak masalah etis. Penyebaran disinformasi dan hoaks adalah salah satu masalah utama yang diidentifikasi; keduanya memiliki kemampuan untuk memanipulasi opini publik dan mempengaruhi hasil pemilu. Media sosial sering menjadi tempat berita palsu dan informasi palsu menyebar dengan cepat, yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Dalam situasi ini, Patrut dan Patrut menekankan

perlu nya peraturan dan peraturan yang lebih ketat untuk penyebaran informasi di media sosial.

4. **Polarisasi Sosial dan Ruang Gema:** Buku ini juga membahas polarisasi sosial dan ruang gema, juga dikenal sebagai echo chambers. Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial mengutamakan konten yang selaras dengan preferensi pengguna, yang menghasilkan kelompok sosial yang berbeda. Hal ini dapat memperburuk polarisasi politik, terutama di komunitas yang sudah sangat terpecah. Polarisasi ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan perselisihan sosial lebih parah dan memperlebar jarak antara kelompok politik yang berbeda.
5. **Keberlanjutan dan Masa Depan Media Sosial dalam Politik:** Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan yang optimis sekaligus skeptis mengenai masa depan media sosial dalam politik. Di satu sisi, media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik dan memberdayakan orang untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, di sisi lain, tantangan terkait disinformasi, polarisasi, dan penyalahgunaan platform ini menuntut adanya inovasi dalam kebijakan publik dan regulasi media sosial. Penulis mengajak para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Discussion

Kritik Pembaca Terhadap Buku Social Media in Politics Case Studies on the Political Power of Social Media

Buku "Media Sosial dalam Politik: Studi Kasus tentang Kekuatan Politik Media Sosial" membahas bagaimana media sosial telah berkembang menjadi platform penting bagi kampanye politik untuk berbagai tujuan, termasuk mengumpulkan dana untuk partai politik dan mendapatkan dukungan dari calon pemilih. Beberapa fungsi media sosial sangat penting dalam komunikasi politik.

- a. Kampanye politik yang menggunakan media sosial lebih efektif, dan kampanye politik yang menggunakan media sosial dapat menjangkau calon pemilih dengan lebih baik.
- b. Media sosial mendekatkan politisi dengan pemilih dan masyarakatnya
- c. Komunikasi ini dapat terjadi di mana-mana dan dengan berbagai agenda.
- d. Media sosial memediasi komunikasi politik dengan audiens yang lebih luas. Dalam konteks politik internasional, penggunaan media sosial telah membantu para politisi berkomunikasi dengan audiens yang berasal dari berbagai bangsa dan bahasa.
- e. Penggunaan media sosial meningkatkan literasi politik anggota masyarakat. Penggunaan media sosial untuk komunikasi politik memungkinkan anggota masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang politik dan meningkatkan peluang mereka untuk mempelajarinya[8] .

Terlepas dari manfaat dan keuntungan yang disebutkan di atas untuk audiens, penggunaan media sosial juga memiliki kelemahan dan efek negatifnya. Pertama dan terpenting, penggunaan media sosial dalam komunikasi politik dapat mengurangi keterlibatan publik dalam kegiatan politik. Adanya sensor pemerintah terhadap media sosial adalah salah satu penyebab pembatasan ini. Selain itu, penggunaan media sosial meningkatkan polarisasi di antara anggota masyarakat. Dengan menggunakan media sosial untuk komunikasi politik, terbentuk kelompok dalam masyarakat berdasarkan ideologi dan preferensi politik. Akibatnya, orang yang menggunakan media sosial cenderung bersahabat dan berbicara dengan orang yang memiliki ideologi dan preferensi politik yang sama.

Ulasan Untuk Konteks Indonesia

Penggunaan media sosial dalam komunikasi politik dapat mengurangi keterlibatan publik dalam kegiatan politik. Pembatasan ini disebabkan oleh sensor di Indonesia, yang diatur oleh peraturan pemerintah tentang sensor media sosial. Itu

sebabnya sulit bagi anggota masyarakat untuk sepenuhnya terlibat dalam komunikasi politik dengan politisi, terutama mereka yang dianggap sebagai oposisi terhadap pemerintah.

Karena tidak semua anggota masyarakat memiliki akses ke Internet, penggunaan media sosial akan meningkatkan marginalisasi dan polarisasi audiens politik, memungkinkan kelompok terpinggirkan untuk berpartisipasi politik secara online. Selain itu, kurangnya sumber daya dan keterampilan yang diperlukan oleh orang-orang yang belum akrab dengan internet, serta perangkat seperti ponsel dan komputer, yang membutuhkan infrastruktur internet.

Untuk menunjukkan kemampuan mereka dan meningkatkan ketenaran mereka, para kandidat untuk posisi politik yang berbeda berkampanye dengan memposting informasi di jejaring sosial Facebook. Mereka juga menunjukkan diri mereka sebagai alternatif yang layak dan juru bicara penting bagi masyarakat. Politisi akan menggunakan Facebook untuk membuat petisi virtual untuk mendorong atau membawa perubahan, tergantung pada posisi mereka. Mereka akan mengundang orang untuk terlibat dalam proses politik, mempresentasikan proyek dan pencapaian mereka, mempertahankan posisi mereka tentang berbagai masalah sosial yang penting, menggunakan statistik sebagai pendukung, dan menyapa teman virtual mereka seolah-olah mereka ada. Mereka akan memobilisasi pemilih mereka, menyerang lawan mereka, dan mendorong sumbangan dan diskusi tentang masalah komunitas.

Komunikasi politik yang tidak memiliki etika berarti telah mengorbankan massa, bukan individu. Semakin banyak pengguna media sosial, semakin banyak korban pelanggaran komunikasi massa. Perkembangan demokrasi akan cenderung merugikan dan tidak mendidik jika tidak ada etika dalam proses komunikasi politik yang menggunakan media sosial. Namun, karena demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan dengan politik seharusnya mengedepankan kepentingan umum, beretika, dan bermoral saat memberikan pendapat publik.

Pihak media selalu menggunakan pihaknya sebagai saluran, yang merupakan bagian dari proses komunikasi politik. Sementara media sosial adalah media kolaboratif yang didirikan oleh perusahaan dengan konten yang dibuat pengguna, penanggung jawab komunikasi politik media sosial adalah individu atau lembaga pengguna atau pemilik akun. Jika ada kasus, tuntutan akan ditujukan kepada pemilik akun, baik lembaga maupun individu.

Conclusions

Buku ini memberikan analisis menyeluruh tentang bagaimana media sosial telah menjadi kekuatan penting dalam politik kontemporer. Melalui berbagai studi kasus di seluruh dunia, penulis mengkaji bagaimana media sosial memengaruhi opini publik, memobilisasi massa, dan mengubah cara kampanye politik konvensional berjalan.

Kesimpulan utama buku ini mencakup:

1. Transformasi Komunikasi Politik: Cara politisi berkomunikasi dengan masyarakat telah berubah karena pengaruh media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memungkinkan komunikasi langsung tanpa perantara, yang memungkinkan politisi dan pemilih menjalin hubungan yang lebih personal satu sama lain.
2. Mobilisasi dan Engagement: Media sosial telah berkembang menjadi alat yang berguna untuk mendorong dukungan dan meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dalam berbagai kampanye politik, gerakan sosial, dan revolusi.
3. Dampak Global dan Lokal: Buku ini membahas bagaimana media sosial memungkinkan masalah lokal mendapatkan perhatian internasional dan juga membantu menerjemahkan masalah global ke dalam konteks lokal. Peran media sosial dalam gerakan demonstrasi seperti Musim Semi Arab dan kampanye politik di Barat menunjukkan efeknya yang lintas batas.

4. Tantangan dan Risiko: Penulis menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat, juga ada tantangan. Misalnya, disinformasi menyebar, polarisasi politik, dan manipulasi opini publik melalui kampanye dan algoritme terkoordinasi
5. Penelitian Kasus yang Beragam: Buku ini memberikan perspektif dari berbagai budaya dan negara, memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial memengaruhi berbagai sistem politik, dari demokrasi yang mapan hingga pemerintahan yang otoriter.

Media Sosial dalam Politik: Studi Kasus tentang Kekuatan Politik Media Sosial" adalah sumber yang bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana media sosial memengaruhi lanskap politik global. Buku ini menunjukkan manfaat media sosial sebagai alat demokrasi dan tanggung jawab untuk mengurangi efek negatifnya. Peneliti, praktisi politik, aktivis, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami hubungan yang kompleks antara politik dan teknologi di era digital harus membaca buku ini. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana media sosial telah mengubah interaksi pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan analitis dan berbasis kasus.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam politik modern, masih ada banyak hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Untuk mengetahui bagaimana media sosial berdampak pada demokrasi dan proses politik dalam jangka panjang, penelitian lebih lanjut diperlukan. Selain itu, penelitian tentang solusi untuk disinformasi dan polarisasi melalui peraturan yang tepat dan teknologi yang lebih maju juga penting.

Secara keseluruhan, buku Patrut dan Patrut "Social Media in Politics" membahas bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk membentuk politik dan juga membahas tantangan dan potensi efek negatif dari penggunaan platform digital ini dalam politik.

References

- [1] T. Z., *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press, 2014.
- [2] & M. M. H. P., N Howard., *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring*. Oxford University Press, 2013.
- [3] B. S., "Social Media Use and Participation: A Meta-analysis of Current Research.," *Information, Commun. Soc.*, vol. 18, no. 5, pp. 524–538, 2015.
- [4] P. Petrova, Maria., Sen, Ananya ., dan Yildirim, "Social Media and Political Contributions: The Impact of New Technology on Political Competition," *Gen. Econ.*, 2020.
- [5] S. Harrison, J., & Freeman, "The Influence of Social Media on Political Participation: A Study of the 2016 US Presidential Election," *J. Polit. Sci.*, vol. 28, no. 3, pp. 242–260, 2017.
- [6] C. Shirky, *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. Penguin Press, 2008.
- [7] Philip N. Howard dan Muzammil M. Hussain, *Social Media and Political Change: Egypt's Revolution 2.0*. 2013.
- [8] Bogdan Pătruț dan Monica Pătruț , *Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media*. Springer, 2014.